

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Gambaran Umum Objek Penelitian

Bursa Efek Indonesia merupakan salah satu lembaga keuangan yang mengelola pasar modal yang terbentuk melalui penggabungan antara Bursa Efek Jakarta dan Bursa Efek Surabaya. Bursa Efek Indonesia merupakan suatu lembaga keuangan yang terorganisasi dan didalamnya terdapat perusahaan-perusahaan listing yang terbagi menjadi 9 sektor yaitu, sektor pertanian, sektor pertambangan, sektor industri dasar dan kimia, sektor aneka industri, sektor industri barang konsumsi, sektor properti, real estate dan konstruksi bangunan, sektor infrastruktur, utilitas dan transportasi, sektor keuangan, sektor perdagangan, jasa dan investasi (www.sahamok.com, 2019). Sektor keuangan adalah salah satu kelompok perusahaan yang ikut berperan aktif dalam pasar modal karena sektor keuangan merupakan penunjang sektor riil dalam perekonomian Indonesia. Di Bursa Efek Indonesia sektor keuangan dibagi menjadi 5 subsektor yang terdiri dari subsektor bank, subsektor lembaga pembiayaan, subsektor perusahaan efek, subsektor asuransi, dan subsektor reksa dana (www.sahamok.com, 2019). Subsektor bank merupakan perusahaan yang saat ini sangat diminati oleh para investor karena imbalan hasil atau *return* atas saham yang akan diperoleh sangat menjanjikan.

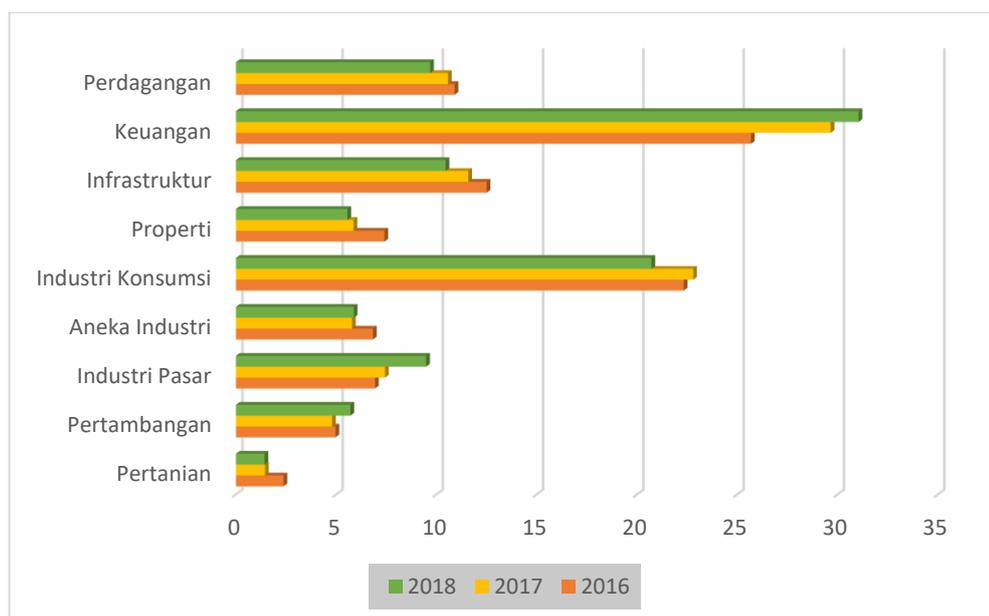
Menurut Undang-undang RI nomor 10 tahun 1998 tanggal 10 November 1998 tentang Perbankan, yang dimaksud dengan bank ialah “Badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak”. Berdasarkan dari Undang-undang nomor 10 tahun 1998, secara garis besar tujuan perbankan Indonesia adalah menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan, pertumbuhan ekonomi, dan stabilitas nasional kearah peningkatan kesejahteraan rakyat. Sebagai lembaga intermediasi keuangan, bank memiliki

fungsi utama dan fungsi sampingan. Fungsi utama bank yaitu sebagai tempat menghimpun dana dari masyarakat, Bank bertugas mengamankan uang tabungan dan deposito berjangka serta simpanan dalam rekening koran atau giro. Fungsi yang kedua yaitu bank sebagai penyalur dana atau pemberi kredit kepada masyarakat yang membutuhkan terutama untuk usaha-usaha produktif.

Perbankan memiliki 3 fungsi yaitu, *agent of trust* yang artinya pembawa kepercayaan, bank dinilai sebagai lembaga yang mengandalkan kepercayaan sebagai kunci dan dasar utama kegiatan perbankan. Kemudian *agent of development*, bank disebut sebagai *agent of development* lantaran mampu memberikan kegiatan yang memungkinkan masyarakat untuk melakukan investasi, distribusi, konsumsi atau jasa yang menggunakan uang sebagai medianya. Yang terakhir yaitu *agent of service*, bank menawarkan berbagai jasa keuangan pada masyarakat seperti jasa penyimpanan dana, jasa pemberian pinjaman, dan lain sebagainya (www.cermati.com, 2019).

Dalam Undang-undang Perbankan Nomor 10 Tahun 1998 jenis bank dilihat dari fungsinya antara lain, Bank Sentral yaitu sebuah badan keuangan milik negara yang diberikan tanggung jawab untuk mengatur dan mengawasi kegiatan-kegiatan lembaga-lembaga keuangan dan menjamin agar kegiatan badan-badan keuangan tersebut akan menciptakan tingkat kegiatan ekonomi yang stabil. Selanjutnya, Bank Umum yaitu bank yang melaksanakan kegiatan usaha perbankan secara konvensional dan berdasarkan pada prinsip syariah Islam yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Dan Bank Perkreditan Rakyat (BPR) yaitu bank yang melaksanakan kegiatan perbankan secara konvensional maupun prinsip syariah Islam di mana dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Kegiatan BPR lebih sempit daripada, yang mana BPR hanya melayani penghimpunan dana dan penyaluran dana saja. Bahkan dalam menghimpun dana, BPR dilarang menerima simpanan giro. Dalam wilayah operasi pun, BPR juga dibatasi operasinya pada wilayah tertentu. Larangan lain yaitu tidak ikut kliring dan transaksi valuta asing (www.cermati.com, 2019).

Dapat dilihat pada Gambar 1.1 bahwa pada sektor keuangan memiliki nilai perdagangan saham yang lebih tinggi dibandingkan dengan nilai perdagangan saham sektor lainnya yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Pada tahun 2016 sektor keuangan memiliki nilai sebesar 25,69%, pada tahun 2017 sebesar 29,66% dan pada 2018 sebesar 31,05%. (www.ojk.go.id, 2019). Hal ini dapat diindikasikan bahwa investor lebih tertarik untuk berinvestasi pada sektor keuangan dibandingkan dengan sektor lainnya yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.



Gambar 1.1 Grafik Perkembangan Perdagangan Saham Sektoral

Sumber: www.ojk.go.id 2019

Manajemen laba merupakan sebuah tindakan yang dilakukan oleh pihak tertentu yang biasanya dilakukan manajemen perusahaan dalam mengatur laba untuk maksud dan tujuan tertentu (Fahmi, 2013:279). Sedangkan menurut Indriastuti (2012) manajemen laba diduga muncul atau dilakukan oleh manajer atau para pembuat laporan keuangan dalam proses pelaporan keuangan suatu organisasi karena mereka mengharapkan suatu manfaat dari tindakan yang dilakukannya. Motivasi untuk memenuhi target laba dapat membuat manajer atau perusahaan mengabaikan praktek bisnis yang baik. Akibatnya, kualitas laba dan pelaporan keuangan menjadi menurun. Manajemen laba tidak hanya berkaitan dengan

motivasi individu manajer tetapi bisa juga untuk kepentingan perusahaan (Hery, 2017:163).

Untuk meminimalisir terjadinya praktik manajemen laba, maka perbankan di Indonesia harus menerapkan praktik *Good Corporate Governance*. Semakin kompleksnya resiko yang dihadapi bank maka semakin meningkat pula kebutuhan praktik *Good Corporate Governance* oleh perbankan. Menurut Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 55/POJK.03/2016 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Umum, penerapan *Good Corporate Governance* ditujukan untuk meningkatkan kinerja bank, meningkatkan kepatuhan terhadap perundang-undangan yang berlaku serta nilai etika yang berlaku umum pada industri perbankan, dan melindungi kepentingan *stakeholder* (www.ojk.go.id). Berdasarkan dari penjelasan yang telah diuraikan diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengenai *Good Corporate Governance* dan manajemen laba di perbankan.

1.2 Latar Belakang Penelitian

Industri perbankan mempunyai peranan penting dalam pembangunan nasional serta menunjang perekonomian masyarakat. Laporan keuangan dijadikan dasar oleh Bank Indonesia dalam menentukan status suatu bank apakah bank tersebut sehat atau tidak. Laporan keuangan merupakan suatu bentuk pertanggungjawaban manajemen yang mengandung informasi tentang kondisi suatu perusahaan. Laporan keuangan digunakan untuk mengukur kinerja manajemen dalam mengelola perusahaan, sehingga sangat bermanfaat bagi para pengguna laporan keuangan baik manajemen ataupun *stakeholder* dalam membuat keputusan ekonomi yang bersifat *financial*. Oleh karena itu laporan keuangan yang mengandung informasi laba harus memiliki kualitas yang baik agar tidak menyesatkan penggunaannya (Dewi dan Khoiruddin, 2016).

Salah satu elemen penting dalam laporan keuangan yang digunakan untuk mengukur kinerja manajemen adalah laba. Laporan laba/rugi memberikan informasi yang sangat dibutuhkan oleh pemegang saham maupun calon investor dalam membuat keputusan untuk menginvestasikan dana yang mereka miliki. Oleh karena itu, laporan laba/rugi ini sering menjadi target dalam rekayasa melalui

tindakan oportunitis manajemen dalam memenuhi tujuannya. Tindakan yang lebih mementingkan kepentingan sendiri (*Opportunistic*) tersebut dilakukan dengan cara memilih kebijakan akuntansi tertentu, sehingga laba dapat diatur untuk dinaikkan atau diturunkan sesuai dengan keinginannya. Perilaku manajemen untuk mengatur laba sesuai keinginannya tersebut dikenal dengan istilah manajemen laba (Ningsaptiti, 2010).

Menurut Fahmi (2013:279) manajemen laba adalah tindakan yang dilakukan oleh pihak tertentu yang biasanya dilakukan manajemen perusahaan dalam mengatur laba untuk maksud dan tujuan tertentu. Sedangkan menurut Indriastuti (2012) manajemen laba diduga muncul atau dilakukan oleh manajer atau para pembuat laporan keuangan dalam proses pelaporan keuangan suatu organisasi karena mereka mengharapkan suatu manfaat dari tindakan yang dilakukannya. Sampai saat ini manajemen laba masih dianggap sebaga permasalahan yang sangat serius. Alasannya, manajemen laba seolah-olah menjadi budaya yang dilakukan oleh hampir semua perusahaan di dunia. Dalam teori *agency* menurut Jensen dan Meckling (1976) menyebutkan bahwa manajemen laba muncul sebagai dampak masalah keagenan yang terjadi karena adanya ketidakselarasan kepentingan antara pemilik (*principal*) dan manajemen perusahaan (*agent*) atau yang disebut dengan *agency conflict*.

Fenomena manajemen laba telah memunculkan banyak kasus, yang belum lama ini terjadi yaitu kasus pada perusahaan perbankan di Indonesia yaitu PT. Bank Bukopin Tbk (BBKP) merevisi laporan keuangan tiga tahun terakhir, yaitu 2015,2016, 2017. Bank Bukopin merevisi laba bersih 2016 menjadi Rp 183,56 miliar dari sebelumnya Rp 1,08 triliun. Penurunan terbesar adalah bagian pendapatan ini turun dari Rp 1,06 triliun menjadi Rp 317,88 miliar. Selain itu revisi juga terjadi pada pembiayaan anak usaha Bank Syariah Bukopin (BSB) terkait penambahan saldo cadangan kerugian penurunan nilai debitor tertentu. Akibatnya, beban penyisihan kerugian penurunan nilai atas aset keuangan direvisi meningkat dari Rp 649,05 miliar menjadi Rp 797,65 miliar. Hal ini menyebabkan beban perseroan meningkat Rp 148,6 miliar. Sebelum Otoritas melakukan klarifikasi,

sebenarnya Bukopin telah 'dihukum' atas insiden ini. Bukopin telah merevisi turun ekuitas yang dimiliki sebesar Rp 2,62 triliun pada akhir 2016, dari Rp 9,53 triliun menjadi Rp 6,91 triliun. Penurunan itu karena revisi turun saldo laba Rp 2,62 triliun menjadi Rp 5,52 triliun karena laba yang dilaporkan sebelumnya tidak benar. Penurunan ekuitas ini berperan dalam tergerusnya rasio kecukupan modal (capital adequacy ratio/CAR) Bukopin. Pada laporan keuangan 2016 sebelum revisi, CAR Bukopin masih aman 15,03%, namun setelah revisi CAR tersisa 11,62%. (www.detik.com, 2018).

Pada 2018 juga terdapat kasus kredit fiktif pada Bank Mandiri Bandung. Tiga pejabat bank dan satu orang dari PT Tirta Amarta Bottling (TAB) didakwa pasal berlapis. Ketiga pejabat Bank Mandiri itu antara lain Surya Beruna (commercial banking manager Bank Mandiri Bandung), Teguh Kartika Wibowo (senior credit risk manager Bank Mandiri Bandung) dan Frans Eduard Zandstra (senior relation manager Bank Mandiri Bandung). Sedangkan satu terdakwa lainnya yaitu direktur PT TAB Roni Tedi. Jaksa menyebutkan Roni terbukti telah memalsukan laporan keuangan dengan seolah-olah memiliki aset dan piutang mencapai Rp 1,1 triliun. Sehingga dirinya mengajukan kredit kepada Bank Mandiri. Namun kenyataannya, laporan keuangan tersebut tidak ada alias fiktif. Jaksa menyebutkan Roni telah mengajukan fasilitas kredit sejak 2008 hingga 2012 dengan data fiktif. Dalam dakwaannya, jaksa menyebut peran tiga pejabat Bank Mandiri. Jaksa menyebut ketiganya lalai karena tidak memverifikasi pemberian kredit dengan nilai fantastis. (www.detik.com, 2018)

Kemudian pada tahun 2016 lalu OJK Sulawesi Utara ingatkan BPR untuk tidak merekayasa laporan keuangan. kepala OJK Sultra mengaku menyampaikan peringatan tersebut karena menemukan indikasi adanya pengelola BPR di Sultra yang membuat laporan keuangan tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya. Para pengelola BPR merekayasa laporan keuangan tersebut rata-rata untuk mendapat pujian atau penghargaan dari pemegang saham atau pemilik bank. (www.antaraneews.com, 2019).

Kasus lain juga terjadi pada BPR KS Bali Agung Sedana. OJK mengungkap kasus tindak pidana perbankan yang dilakukan oleh Direktur Utama BPR KS Bali Agung Sedana berinisial NS. Kasus ini terkait pemberian kredit kepada 54 debitur dengan nilai Rp 24,225 miliar yang tidak sesuai prosedur. Pengungkapan kasus ini disampaikan Kepala Departemen Penyidikan Sektor Jasa Keuangan OJK Rokhmad Sunanto. Ia menjelaskan, pengungkapan kasus ini berawal dari temuan dalam proses pengawasan yang dilakukan OJK terhadap kegiatan BPR KS BAS. Modus yang dilakukan NS sebagai Direktur Utama sekaligus sebagai Pemegang Saham PT BPR KS BAS adalah dengan memerintahkan pegawai BPR untuk memproses pemberian kredit kepada debitur dengan total nilai Rp 24,225 miliar periode Maret-Desember 2014. Proses pemberian kredit tidak sesuai dengan prosedur menyebabkan pemalsuan pencatatan laporan keuangan. Sejak 12 April 2017 BPR tersebut telah masuk status Bank Dalam Pengawasan Khusus. Dan sesuai ketentuan yang berlaku, kepada BPR dimaksud diberikan kesempatan selama 180 hari atau sampai dengan 9 Oktober 2017 untuk melakukan upaya penyehatan. Pada tanggal 3 November 2017 OJK melalui Keputusan Dewan Komisiner (KDK) Nomor KEP-202/D.03/2017 tentang Pencabutan Izin Usaha PT Bank Perkreditan Rakyat KS Bali Agung Sedana, mencabut izin usaha PT Bank Perkreditan Rakyat KS Bali Agung Sedana yang beralamat di Jalan Raya Kerobokan Nomor 15Z, Kuta, Badung Bali. (www.kompas.com, 2019).

Manajemen laba dapat terjadi karena lemahnya penerapan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance*. *Good Corporate governance* diperlukan untuk mendorong terciptanya pasar yang efisien, transparan, dan konsisten dengan peraturan perundang-undangan (Hamdani, 2016). Praktik manajemen laba dapat mengikis kepercayaan investor dalam kualitas pelaporan keuangan dan menghambat kelancaran arus modal di pasar keuangan (Dewi dan Khoiruddin, 2016). Berdasarkan situasi inilah, penyelesaian terbaik dari masalah manajemen laba yaitu dengan penerapan mekanisme *Good Corporate Governance*, karena dengan adanya praktek *Good Corporate Governance* dapat meminimalisir terjadinya manajemen laba.

Di dalam *Good Corporate Governance* terdapat beberapa mekanisme pengawasan yang diduga dapat mengurangi adanya praktik manajemen laba, yaitu dewan komisaris independen, komite audit, serta kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional. Faktor yang pertama adalah dewan komisaris independen, yang bertugas dan bertanggungjawab secara kolektif untuk melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada direksi serta memastikan bahwa perusahaan melaksanakan *Good Corporate Governance* (Hamdani, 2016:82-83). Komisaris independen berjumlah sebanding dengan jumlah saham yang dimiliki oleh pemegang saham pengendali dengan ketentuan jumlah komisaris independen sekurang-kurangnya 50% dari komisaris seluruh anggota komisaris (Pasaribu, Koswanda, Firdaus dan Ummah, 2015). Komisaris independen memiliki peran penting didalam sebuah perusahaan yaitu untuk mengurangi tindakan manajemen melakukan manajemen laba, sesuai dengan tugas umum dewan komisaris yang melakukan pengawasan terhadap kualitas informasi yang terdapat pada laporan keuangan. Dewan yang terdiri dari dewan komisaris independen yang lebih besar memiliki kontrol yang kuat atas keputusan manajemen. Hal ini karena semakin banyak komisaris independen maka pengawasan terhadap kebijakan manajemen juga akan bertambah banyak, dan manajemen akan lebih memperhatikan kepentingan perusahaan dari pada kepentingan sendiri sehingga manajemen laba yang dilakukan oleh manajemen juga akan berkurang. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Mulyani (2018) dewan komisaris independen dinyatakan berpengaruh negatif terhadap manajemen laba. Berbeda dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Dewi dan Khoiruddin (2016) menyatakan bahwa dewan komisaris independen berpengaruh positif dan signifikan terhadap manajemen laba.

Faktor kedua adalah komite audit, berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 55/POJK.04/2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit, yang dimaksud dengan komite audit adalah komite yang dibentuk oleh dan bertanggung jawab kepada dewan komisaris dalam melaksanakan tugas dan fungsi dewan komisaris dalam rangka peningkatan kualitas laporan keuangan dan peningkatan efektivitas internal dan eksternal audit. Komite audit juga memiliki tugas untuk melakukan pengawasan agar meningkatkan

efektivitas dalam menciptakan keterbukaan dan pelaporan keuangan yang berkualitas. Dengan adanya komite audit diharapkan dapat mengurangi tindakan manajemen dalam melakukan praktik manajemen laba untuk meningkatkan kesejahteraan sepihak. Penelitian yang dilakukan oleh Mulyani (2018) komite audit dinyatakan berpengaruh negatif terhadap manajemen laba. Sedangkan pada penelitian yang dilakukan oleh Nurlis (2016) komite audit dinyatakan tidak berpengaruh signifikan terhadap manajemen laba.

Faktor ketiga adalah kepemilikan manajerial, menurut Kusumawardhani (2012) kepemilikan manajerial merupakan persentase saham yang dimiliki oleh pihak manajemen, pihak manajemen yang dimaksud adalah pengelola perusahaan (direktur, manajer, dan karyawan). Kepemilikan saham oleh manajerial, diharapkan dapat membuat manajer bertindak sesuai dengan keinginan para *principal* karena manajer akan termotivasi untuk meningkatkan kinerja dalam perusahaan (Fahdiansyah *et al*, 2018). Sehingga kepentingan pemilik atau pemegang saham akan dapat disejajarkan dengan kepentingan manajer. Hal tersebut berarti bahwa di Indonesia kepemilikan manajerial mampu menjadi mekanisme Good Corporate Governance yang dapat mengurangi masalah ketidakselarasan kepentingan antara manajer dengan pemilik atau pemegang saham, semakin banyak saham yang dimiliki oleh manajemen maka akan semakin rendah praktik manajemen laba. Hasil penelitian yang dilakukan Agustia (2013) menyatakan bahwa kepemilikan manajerial tidak mempunyai pengaruh terhadap manajemen laba. Namun pada penelitian yang dilakukan oleh Rahardi dan Prastiwi (2014) kepemilikan manajerial berpengaruh negatif terhadap manajemen laba.

Faktor terakhir yaitu kepemilikan institusional, kepemilikan institusional merupakan kepemilikan saham di perusahaan yang dimiliki oleh investor institusi, seperti perusahaan asuransi, institusi keuangan (bank, perusahaan keuangan, kredit), dana pensiun, *investment banking*, dan perusahaan lainnya yang terkait dengan kategori tersebut (Agustia,2013). Kepemilikan institusional memiliki arti penting dalam memonitor manajemen karena dengan adanya kepemilikan institusional akan mendorong peningkatan pengawasan yang lebih optimal,

pengaruh kepemilikan institusional sebagai agen pengawas ditekan melalui investasi mereka yang cukup besar dalam pasar modal (Fahdiansyah *et al*, 2018). Dengan adanya kepemilikan institusional dapat memperkecil kemungkinan terjadinya manajemen laba karena investor institusional dapat melakukan monitoring dan dianggap tidak mudah dibodohi oleh tindakan manajer. Menurut hasil penelitian yang dilakukan oleh Nurlis (2016) menyatakan bahwa kepemilikan institusional berpengaruh terhadap manajemen laba. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Rahardi dan Prastiwi (2014) menyatakan bahwa kepemilikan institusional memiliki pengaruh negatif terhadap manajemen laba.

Berdasarkan dari fenomena yang terjadi dan penelitian terdahulu menunjukkan hasil yang masih inkonsisten, sehingga pada penelitian ini dilakukan pengkajian kembali tentang pengaruh dewan komisaris independen, komite audit, kepemilikan manajerial, dan kepemilikan institusional terhadap manajemen laba. Oleh karena itu penelitian ini berjudul **“PENGARUH *GOOD CORPORATE GOVERNANCE* TERHADAP MANAJEMEN LABA (Studi pada Perusahaan Perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2016-2018)”**.

1.3 Perumusan Masalah

Laba merupakan aspek penting dalam sebuah laporan keuangan yang dibutuhkan untuk mengukur kinerja manajemen. Informasi laba yang disajikan dalam laporan keuangan dapat memberikan gambaran kinerja perusahaan sedang berada dalam keadaan keuangan yang baik atau tidak, sehingga seringkali manajer perusahaan melakukan praktik manajemen laba untuk mengatur keadaan laba agar terlihat berada dalam keadaan keuangan yang baik untuk mengelabui investor yang ingin mengetahui kinerja dan kondisi perusahaan.

Perbedaan kepentingan dan informasi antara investor dan manajer perusahaan merupakan salah satu penyebab terjadinya praktik manajemen laba. Maka salah satu cara untuk meminimalisir upaya manajemen laba adalah dengan menerapkan praktik *good corporate governance*. Upaya ini dilakukan untuk meningkatkan kualitas laporan keuangan yang dipublikasikan oleh perusahaan. Mekanisme *good corporate governance* yang diindikasikan dapat mempengaruhi manajemen laba yang

digunakan dalam penelitian ini diantaranya adalah dewan komisaris independen, komite audit, kepemilikan manajerial dan kepemilikan institusional. Sehingga pada penelitian ini dilakukan pengujian terhadap pengaruh dewan komisaris independen, komite audit, kepemilikan manajerial dan kepemilikan institusional terhadap manajemen laba. Berdasarkan rumusan masalah tersebut maka pertanyaan dari penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana dewan komisaris independen, komite audit, kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional dan manajemen laba pada perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2016-2018?
2. Apakah dewan komisaris independen, komite audit, kepemilikan manajerial, dan kepemilikan institusional berpengaruh secara simultan terhadap manajemen laba pada perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2016-2018?
3. Apakah secara parsial:
 - a. Dewan komisaris independen berpengaruh terhadap manajemen laba pada perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2016-2018?
 - b. Komite audit berpengaruh terhadap manajemen laba pada perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2016-2018?
 - c. Kepemilikan manajerial berpengaruh terhadap manajemen laba pada perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2016-2018?
 - d. Kepemilikan institusional berpengaruh terhadap manajemen laba pada perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2016-2018?

1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan diatas maka tujuan dari penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana dewan komisaris independen, komite audit, kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional, dan manajemen laba pada

perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2016-2018.

2. Untuk mengetahui apakah dewan komisaris independen, komite audit, kepemilikan manajerial, dan kepemilikan institusional berpengaruh secara simultan terhadap manajemen laba pada perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2016-2018.
4. Untuk mengetahui apakah secara parsial:
 - a. Dewan komisaris independen berpengaruh terhadap manajemen laba pada perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2016-2018.
 - b. Komite audit berpengaruh terhadap manajemen laba pada perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2016-2018.
 - c. Kepemilikan manajerial berpengaruh terhadap manajemen laba pada perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2016-2018.
 - d. Kepemilikan institusional berpengaruh terhadap manajemen laba pada perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2016-2018.

1.5 Manfaat Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan harapan penelitian ini dapat memiliki manfaat untuk berbagai pihak, diantaranya yaitu:

1.5.1 Aspek Teoritis

Manfaat teoritis yang ingin dicapai peneliti dalam penelitian ini antara lain:

1. Bagi peneliti
Hasil penelitian ini dapat menambah wawasan dan pengetahuan mengenai pengaruh *Good Corporate Governance* (komite audit, proporsi dewan komisaris independen, kepemilikan manajerial, dan kepemilikan institusional) terhadap manajemen laba khususnya sektor perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.
2. Bagi pihak akademis

Hasil penelitian ini dapat menambah wawasan pembaca dan dapat dijadikan sebagai bahan referensi untuk penelitian selanjutnya yang sejenis.

1.5.2 Aspek Praktis

1. Bagi perusahaan

Hasil penelitian ini dapat memberikan kontribusi atau manfaat kepada perusahaan dalam mengimplementasikan *Good Corporate Governance* terhadap manajemen laba.

2. Bagi investor

Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan yang bermanfaat untuk pengambilan keputusan investasi pada perusahaan yang melakukan praktik *Good Corporate Governance*.

1.6 Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup penelitian terdiri dari variabel dan sub variabel, lokasi dan objek penelitian, serta waktu dan periode penelitian.

1.6.1 Variabel dan Sub Variabel Penelitian

Dalam penelitian ini digunakan satu variabel dependen (variabel terikat) dan empat variabel independen (variabel bebas). Variabel dependen dalam penelitian ini adalah manajemen laba, sedangkan variabel independen antara lain adalah dewan komisaris independen, komite audit, kepemilikan manajerial, dan kepemilikan institusional. Penelitian ini akan mengkaji pengaruh dewan komisaris independen, komite audit, kepemilikan manajerial, dan kepemilikan institusional terhadap manajemen laba baik secara simultan maupun secara parsial.

1.6.2 Lokasi dan Objek Penelitian

Penelitian ini menggunakan *website* resmi Bursa Efek Indonesia dan objek penelitian yang digunakan adalah laporan keuangan perusahaan perbankan periode 2016-2018.

1.6.3 Waktu dan Periode Penelitian

Waktu penelitian dilaksanakan sejak bulan Juli hingga Desember 2019. Periode penelitian yang digunakan untuk mengetahui pengaruh dewan komisaris

independen, komite audit, kepemilikan manajerial, dan kepemilikan institusional terhadap manajemen laba adalah selama tiga tahun yaitu tahun 2016-2018.

1.7 Sistematika Penulisan Tugas Akhir

Pembahasan dalam skripsi ini akan dibagi menjadi lima bab yang terdiri dari beberapa sub-bab. Sistematika penulisan skripsi ini secara garis besar adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini memberikan penjelasan mengenai gambaran umum objek penelitian, latar belakang penelitian yang mengangkat fenomena yang menjadi isu penting sehingga layak untuk diteliti, perumusan masalah yang didasarkan pada latar belakang penelitian, tujuan penelitian dan kegunaan penelitian secara simultan dan secara parsial, ruang lingkup penelitian untuk membatasi masalah yang diteliti, serta sistematika penulisan tugas akhir.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA DAN LINGKUP PENELITIAN

Bab ini memberikan penjelasan mengenai tinjauan pustaka sebagai dasar dalam menganalisis permasalahan yang ada. Pada bab ini terdapat landasan teori yang berhubungan dengan penelitian terdahulu, kerangka pemikiran, dan pengembangan hipotesis.

BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini memberikan penjelasan mengenai jenis penelitian, pendekatan penelitian yang digunakan, identifikasi variabel dependen dan variabel independen, definisi operasional variabel, tahapan penelitian, jenis dan sumber data (populasi dan sampel), serta teknik analisis data.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini memberikan penjelasan mengenai deskripsi hasil penelitian yang telah diidentifikasi, analisis model dan hipotesis, dan pembahasan mengenai pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen.

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini berisi kesimpulan atas hasil penelitian serta saran terkait dengan penelitian ini sehingga diharapkan dapat berguna untuk penelitian selanjutnya.

HALAMAN DIKOSONGKAN